

## IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SIPANDU BERADAT UNTUK TATA KELOLA KEPENDUDUKAN DESA ADAT SANGKET

**Ketut Agus Seputra<sup>1</sup>, Wahyu Harta Sasmita<sup>1</sup>, Komang Try Artha Utama Tusan<sup>1</sup>, Kadek Yota Ernanda Aryanto<sup>1</sup>, Luh Joni Erawati Dewi<sup>1</sup>, Ni Ketut Kertiasih<sup>1</sup>, I Gede Partha Sindu<sup>1</sup>, Ni Luh Dewi Sintiari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA  
Email:agus.seputra@undiksha.ac.id

### ABSTRACT

*The Sangket Village (Desa Adat Sangket) faces several challenges in managing population administration, particularly regarding the registration of Krama Tamiu and Tamiu, which has so far been carried out manually. This condition has led to obstacles such as difficulties in data retrieval, delays in updating information, and a lack of accountability in managing the obligations of village members. As a solution, this community service program designed and implemented Digital Technology through the Integrated Traditional Security System (SIPANDU BERADAT), developed in the form of a website <https://sangketdesa.com>. The system is designed to facilitate digital population registration based on location, the dissemination of official village information, as well as the management of public facilities and aid data. The implementation of Digital Technology in SIPANDU BERADAT not only provides a solution to the problems of manual administration but also serves as a strategic tool to enhance the digital branding of the Sangket Traditional Village, strengthen coordination of traditional security, and ensure the continuity of cultural preservation through the use of information technology.*

**Keywords:** Website, Sipandu Beradat, Desa Adat Sangket

### ABSTRAK

Desa Adat Sangket menghadapi sejumlah permasalahan dalam tata kelola administrasi kependudukan, khususnya terkait pendataan Krama Tamiu dan Tamiu yang selama ini dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menimbulkan kendala berupa kesulitan pencarian data, keterlambatan pembaruan informasi, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban krama desa. Sebagai solusi, kegiatan pengabdian ini merancang dan mengimplementasikan Teknologi Digital pada Program Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Adat (SIPANDU BERADAT) yang dikembangkan dalam bentuk website <https://sangketdesa.com>. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pendataan kependudukan secara digital berbasis lokasi, penyebaran informasi resmi desa, serta pengelolaan fasilitas publik dan data bantuan. Untuk memastikan keberlanjutan implementasi, dilakukan pula pendampingan pendataan secara door-to-door, serta sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan prajuru adat, krama tamiu, lurah, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Implementasi teknologi Digital dalam SIPANDU BERADAT tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan administrasi manual, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan branding digital Desa Adat Sangket, memperkuat koordinasi keamanan adat, serta menjaga kesinambungan pelestarian adat dan budaya melalui pemanfaatan teknologi informasi.

**Kata kunci:** Website, Sipandu Beradat, Desa Adat Sangket

### PENDAHULUAN

Desa Adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan spiritual masyarakat Bali. Tugas utama Desa Adat adalah menciptakan kasukretan krama atau kesejahteraan bersama yang menyeluruh di wilayah wewidangan, termasuk menjaga kesucian, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Dalam konteks ini,

seluruh penduduk yang bermukim di wilayah Desa Adat, baik krama asli maupun pendatang, turut memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial, seperti ikut serta dalam upacara penyucian wilayah (mecaru) yang diselenggarakan secara berkala. Fenomena meningkatnya penduduk pendatang akibat keterbukaan investasi, khususnya di sektor perumahan, menyebabkan tantangan baru dalam penertiban dan pendataan krama desa.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan adat, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang memberikan dasar hukum bagi Desa Adat untuk menyelenggarakan tata kelola kependudukan secara mandiri. Dalam konteks ini penduduk yang bermukim diwilayah desa adat disebut sebagai krama desa yang wajib tercatat dalam data krama desa. Krama Desa terdiri atas Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa adat termasuk Desa Adat Sangket yang melakukan pencatatan kependudukan secara manual. Proses ini sering kali mengakibatkan berbagai kendala seperti keterlambatan pembaruan data, kesulitan pencarian arsip, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sumbangan adat (peturunan). Selain itu, minimnya literasi digital di kalangan prajuru adat juga menjadi penghambat utama dalam adopsi teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi berbasis digital dinilai strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. SIPANDU BERADAT (Sistem Keamanan Terpadu berbasis Desa Adat) sebagai sebuah program pemerintah untuk mensinergikan antara Desa Dinas dan Desa Adat telah berjalan di Desa Adat Sangket. Namun diperlukan solusi inovatif yang mengintegrasikan data penduduk adat secara elektronik, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi di tingkat desa telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal (Darmaastawan, Oka Saputra, and Wirastuti, 2021)(Ni Ketut Sudianing and Ketut Agus Seputra, 2019).

Namun demikian, pengembangan sistem informasi desa memerlukan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dan pelatihan keterampilan digital yang berkelanjutan. Keberhasilan integrasi e-administration pada level komunitas adat sangat bergantung pada kemampuan adaptasi teknologi dan dukungan kelembagaan adat(Armiady, 2021). Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan potensi tersebut, pengabdian ini difokuskan pada implementasi dan pendampingan pemanfaatan SIPANDU BERADAT di Desa Adat Sangket, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola kependudukan desa adat

yang transparan, efisien, dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan teknologi informasi.

## **METODE**

### **1. Kajian Pustaka**

#### **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali**

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat eksistensi dan otonomi desa adat, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019(Pemerintah Provinsi Bali, 2019) tentang Desa Adat di Bali. Perda ini tidak hanya menjadi legitimasi hukum atas keberadaan desa adat, tetapi juga memberikan kewenangan penuh bagi desa adat untuk menyelenggarakan urusan tata kelola, termasuk pendataan kependudukan secara mandiri berdasarkan kearifan lokal dan hak asal usul. Penduduk yang tinggal di wilayah desa adat diklasifikasikan secara adat sebagai Krama Desa, yang terdiri dari Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu, masing-masing dengan hak dan kewajiban sosial tertentu dalam tatanan adat Bali. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan berbasis adat, peraturan ini menjadi fondasi hukum utama bagi implementasi sistem informasi pada Program SIPANDU BERADAT, yaitu sistem pengamanan lingkungan dan administrasi kependudukan berbasis teknologi yang dikembangkan di lingkungan desa adat. Sistem ini mampu mendukung pendataan, pelaporan, dan pengelolaan informasi mengenai krama desa secara real-time, sembari tetap mempertahankan struktur sosial dan nilai-nilai adat yang telah berlaku turun-temurun.

Perda No. 4/2019(Pemerintah Provinsi Bali, 2019) merupakan landasan strategis yang memperkuat posisi desa adat sebagai subjek hukum yang berwenang dalam ranah tata kelola pemerintahan lokal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya legitimasi ini, berbagai program digitalisasi seperti Teknologi Digital pada SIPANDU BERADAT dapat diterapkan secara efektif karena telah terintegrasi dengan struktur

kelembagaan adat yang sah dan diakui oleh negara. Ini berarti bahwa pengembangan sistem informasi berbasis adat tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan menjadi bagian integral dari tata pemerintahan berbasis nilai lokal (local wisdom-based governance). Transformasi digital yang berbasis adat ini bahkan dapat menjadi model tata kelola alternatif yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di era modern.

### Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat

SIPANDU BERADAT merupakan inisiatif strategis yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk memperkuat peran desa adat dalam pengamanan wilayah. SIPANDU BERADAT diimplementasikan dengan dasar Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 bukan hanya sebagai alat pengawasan, melainkan juga sebagai sistem pelaporan digital yang menghubungkan prajuru adat, pecalang, dan aparat pemerintah melalui teknologi (Arjaya, Astara, and Kurniawandari, 2023). Sistem ini telah terbukti efektif meningkatkan responsivitas keamanan dan menjaga stabilitas sosial. Namun, tantangan pendanaan dan pelatihan teknis menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi dalam proses implementasi berkelanjutan.

### 2. Tahapan Pelaksanaan



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Gambar 1 dapat memberikan Gambaran singkat terkait tahapan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Program dan Pelatihan Sistem Informasi Desa Adat di Desa Sangket diawali dengan kegiatan orientasi lapangan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap permasalahan

yang ada. Dari permasalahan tersebut, dicarikan alternatif pemecahan masalah yang salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

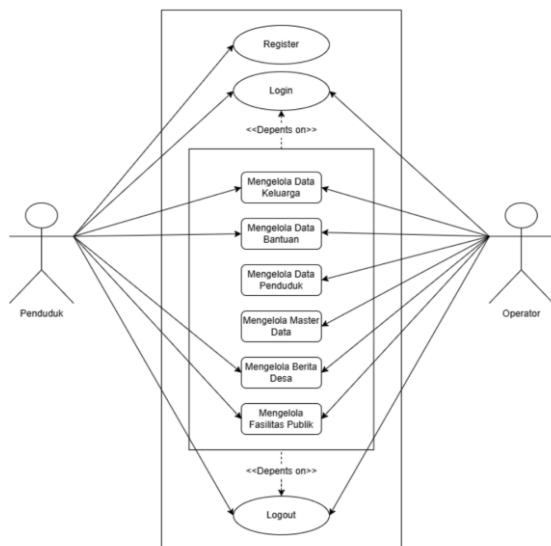
### 1. Temuan

Desa Adat Sangket terletak di Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini merupakan salah satu dari tiga desa adat di wilayah tersebut, bersama dengan Desa Adat Sukasada dan Desa Adat Lumbanan. Desa Adat Sangket memiliki struktur organisasi adat yang lengkap, termasuk keberadaan Pura Kahyangan Tiga, dan aktif dalam melaksanakan upacara adat serta kegiatan keagamaan. Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terletak di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali (Desa Adat Sangket, 2021). Desa Adat Sangket berada di Kecamatan Sukasada, yang berbatasan langsung dengan Kota Singaraja. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Adat Sangket mengalami pertumbuhan jumlah perumahan, terutama dengan adanya investasi dari pengembang. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti konflik antara warga dan pengembang terkait relokasi palinggih (tempat suci) yang dianggap sebagai penjaga niskala lingkungan Sangket. Meskipun tidak terdapat data resmi mengenai jumlah perumahan, indikasi pertumbuhan ini telah mencapai 6 perumahan menunjukkan perlunya pengelolaan yang baik terhadap perkembangan pemukiman di wilayah desa adat. Dari hasil temuan tersebut, diketahui bahwa proses pendataan masih dilakukan secara manual dengan media kertas atau buku besar, yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, minimnya pembaruan, serta tidak adanya sistem pencatatan iuran/peturunan yang transparan. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan rancangan dan fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi SIPANDU BERADAT. Adapun hasil temuan permasalahan dan Solusi yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Masalah dan Solusi

No	Masalah	Solusi	Luaran
1	Bagaimana meningkatkan branding digital Desa Adat Sangket agar lebih dikenal luas oleh masyarakat lokal maupun luar daerah melalui teknologi informasi	Pengembangan konten informasi desa adat	Website Desa Adat
2	Bagaimana mengimplementasikan aplikasi SIPANDU BERADAT untuk mendukung proses pendataan administrasi kependudukan krama desa adat secara digital dan terstruktur?	Sosialisasi Sistem Informasi Desa Adat	Aplikasi SIPANDU BERADAT
3	Bagaimana meningkatkan pemahaman dan keterampilan prajuru adat serta petugas pendataan dalam mengoperasikan aplikasi SIPANDU BERADAT serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan?	Pelatihan dan pendampingan dalam pendataan Penduduk bagi prajuru serta krama desa	

## 2. Pengembangan Sistem Pendataan



Gambar 2. Use Case

Gambar 2 merupakan usecase diagram dari sistem yang dirancang. Use Case diagram ini dapat memberikan ringkasan fitur dari Sistem Informasi. Implementasi Sistem Informasi pada Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Adat (SIPANDU BERADAT) dikembangkan untuk menjawab keterbatasan sistem administrasi lama sekaligus memodernisasi tata kelola desa adat. Melalui platform berbasis web, SIPANDU BERADAT berfungsi sebagai pusat data dan informasi terintegrasi yang dapat diakses secara mudah dan fleksibel melalui berbagai perangkat, baik komputer, laptop, maupun smartphone. Website ini dirancang dengan tujuan utama

mendukung efisiensi pengelolaan administrasi desa adat, mempercepat penyebaran informasi resmi, serta memperkuat koordinasi keamanan dan pengamanan adat. Dengan sistem ini, prajuru adat, petugas keamanan adat, hingga masyarakat dapat memperoleh data dan informasi secara cepat, akurat, dan real-time. Adapun Gambaran umum fitur yang tersedia dapat dilihat pada gambar 2. Adapun penjelasan singkat terkait fitur yang tersedia adalah sebagai berikut.

1. Pendataan Penduduk Terpusat menyediakan sistem pencatatan dan pembaruan data Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu berbasis lokasi secara digital. Fitur ini dirancang memudahkan prajuru dalam pencarian data, pembaruan informasi kependudukan, serta menjaga akuntabilitas data yang sebelumnya sulit dilakukan secara manual.
2. Fitur Berita menjadi sarana publikasi berita, pengumuman, jadwal piodalan, serta agenda kegiatan adat secara cepat dan merata. Memastikan seluruh krama desa dapat menerima informasi yang sama tanpa hambatan jarak maupun waktu.
3. Pengelolaan Data Fasilitas Publik dan Bantuan untuk mengelola informasi terkait bantuan yang diterima penduduk sehingga lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Koordinasi Keamanan Adat guna mendukung petugas keamanan adat dalam melakukan pemantauan, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan pengamanan desa. Fitur ini menyediakan basis data sebagai acuan evaluasi dan perencanaan pengamanan adat yang lebih efektif. Lebih detail terkait laporan pengembangan produk dapat dilihat pada Dokumen Perangkat Lunak Sipandu Beradat.

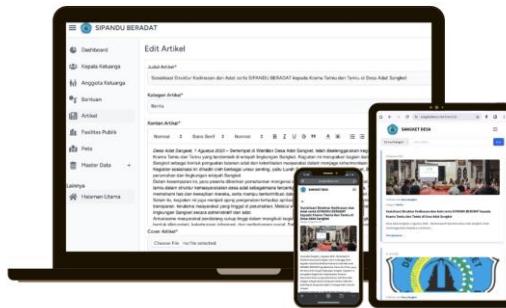
### 3. Pengisian Konten Website

Kegiatan pengisian konten pada website Desa Adat Sangket merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pengamanan Terpadu Berbasis Adat (SIPANDU BERADAT) sebagai media resmi komunikasi, dokumentasi, dan transparansi informasi desa adat. Website ini dirancang tidak hanya sebagai pusat data kependudukan, tetapi juga sebagai sarana publikasi kegiatan adat, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Dalam proses pengisian konten, tim pengelola website yang terdiri atas prajuru adat, perangkat desa, serta perwakilan yowana desa adat, melakukan serangkaian aktivitas, antara lain:

1. Publikasi Informasi Resmi Desa. Memasukkan konten berupa pengumuman paruman, keputusan pararem, agenda piodalan, serta informasi kegiatan desa adat lainnya. Menyediakan ruang untuk berita terkini terkait aktivitas desa sehingga krama mendapatkan akses informasi yang cepat dan valid.
2. Dokumentasi Kegiatan Adat dan Budaya. Mengunggah dokumentasi berupa teks, foto, maupun video dari kegiatan adat, seperti piodalan, karya agung, kegiatan gotong royong, hingga pasraman remaja. Memberikan ruang bagi yowana untuk berkreasi dan menulis artikel terkait pelestarian budaya dan kearifan lokal.
3. Pengelolaan Data Fasilitas dan Layanan Desa Adat. Memasukkan data terkait fasilitas publik, seperti pura, wantilan, balai banjar, serta sarana pendidikan adat.

Menyediakan informasi transparan mengenai program bantuan dan pelayanan adat bagi krama desa.

4. Konten Edukasi dan Pelestarian Budaya. Menampilkan artikel atau materi edukasi tentang awig-awig, pararem, nilai-nilai adat, dan tradisi Bali. Menyediakan menu khusus bagi generasi muda (yowana) untuk mengakses konten pembelajaran adat dan budaya.
5. Penyebarluasan Informasi Keamanan Adat. Memublikasikan kegiatan pengamanan desa yang dilakukan oleh pecalang, termasuk jadwal ronda dan evaluasi kegiatan. Memastikan keterhubungan langsung antara masyarakat dengan prajuru dalam koordinasi keamanan adat dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Fitur Informasi Publik

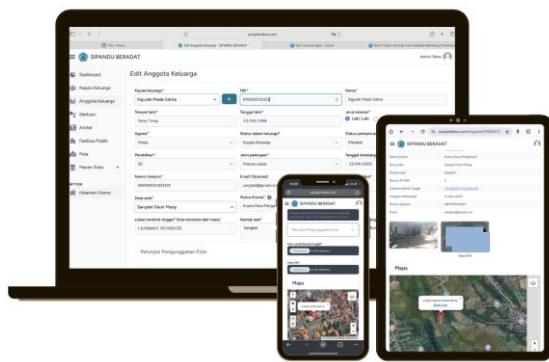
Website <https://sangketdesa.com> dikelola dengan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, serta pelestarian budaya. Kegiatan pengisian konten ini diharapkan dapat menjadikan website Desa Adat Sangket sebagai media informasi digital yang kredibel, sekaligus jembatan antara nilai kearifan lokal dengan kemajuan teknologi dalam tata kelola desa adat di era modern.

### 4. Pendampingan Pendataan Penduduk

Pendataan dilakukan dengan metode *door-to-door* untuk memastikan akurasi data dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi identitas Krama Desa Adat, Krama Tamiu, serta Tamiu, yang selanjutnya diinput ke dalam sistem SIPANDU BERADAT secara digital seperti ditampilkan

pada gambar 4. Dalam pendampingan ini, pengabdi memberikan arahan teknis terkait:

1. Prosedur wawancara dan pencatatan data sesuai format standar yang telah ditetapkan.
2. Teknik verifikasi data agar tidak terjadi duplikasi atau kekeliruan dalam pencatatan.
3. Pelatihan penggunaan perangkat digital (laptop dan smartphone) untuk menginput data ke dalam sistem berbasis web.
4. Penyusunan laporan pendataan sebagai dasar evaluasi dan pembaruan data secara berkala.

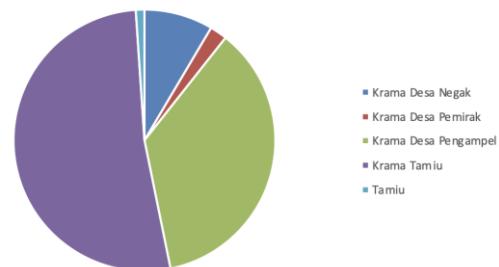


Gambar 4. Fitur Pendataan Krama berbasis Lokasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan Krama Desa Adat Sangket yang dilakukan pada bulan Mei 2025, berhasil diperoleh data kependudukan secara lebih akurat dan terstruktur. Jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 329 jiwa yang tersebar dalam 99 Kepala Keluarga (KK). Selain itu, kegiatan pendataan juga berhasil menghimpun informasi terkait 12 jenis bantuan yang diterima oleh krama desa. Adapun detail persebaran Krama Desa Adat Sangket dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan status krama desa dan berdasarkan asal Desa Adat. Hasil pendataan menunjukkan bahwa jumlah Krama Tamiu yang berasal dari luar wilayah Desa Adat Sangket lebih banyak dibandingkan dengan krama Desa Negak. Hal ini disebabkan karena fokus utama kegiatan pendataan pada bulan Mei 2025 diarahkan pada krama tamiu, yaitu

penduduk yang berasal dari luar Desa Adat Sangket namun tinggal dan menetap di wewidangan desa adat seperti terlihat pada Gambar 5.

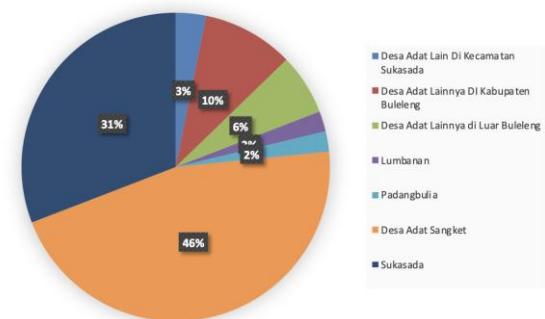
Persebaran Penduduk Menurut Status Krama



Gambar 5. Grafik Persebaran Menurut Status Krama

Namun jika dilihat dari persebaran Krama Desa Adat Sangket menurut asal desa adat menunjukkan variasi yang cukup beragam. Kelompok terbesar berasal dari Desa Adat Sangket sendiri dengan proporsi 46%, mencerminkan hampir setengah dari jumlah krama desa masih merupakan warga asli. Disusul oleh krama yang berasal dari Sukasada sebesar 31%, yang menjadi kelompok kedua terbesar seperti pada gambar 6.

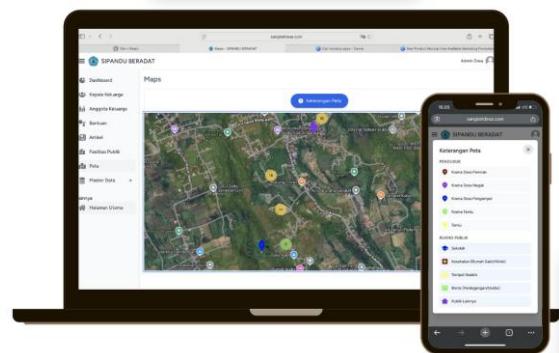
Persebaran Menurut Asal Desa Adat



Gambar 6. Grafik Persebaran Menurut Asal Desa Adat

Tentu pendataan ini belum dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh krama desa yang berada di wilayah Desa Adat Sangket. Namun dengan adanya data ini, prajuru adat memiliki landasan kuat untuk menyusun program kerja, mengetahui pertumbuhan krama tamiu dan tamiu di wilayah Desa Adat, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan kependudukan desa adat. Fitur terakhir adalah keterbukaan

informasi kependudukan bagi pengguna umum. Pengguna dapat melihat data keadaan penduduk dan persebaran pada halaman beranda web, namun tidak dengan nama serta detail informasi penduduk seperti ditampilkan pada gambar 7.



**Gambar 7. Tampilan Persebaran Tempat Tinggal Krama Desa**

## **SIMPULAN**

Melalui pengembangan dan pengelolaan website resmi <https://sangketdesa.com>, Desa Adat Sangket berhasil membangun branding digital yang lebih kuat. Website ini berfungsi sebagai media publikasi resmi yang menampilkan informasi adat, budaya, serta kegiatan desa secara cepat dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya memperkenalkan Desa Adat Sangket kepada masyarakat lokal, tetapi juga memperluas jangkauan ke masyarakat luar daerah bahkan global, sehingga meningkatkan citra dan identitas digital desa adat.

Penerapan SIPANDU BERADAT menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan sistem manual, khususnya terkait pendataan administrasi kependudukan. Melalui pendampingan pendataan door-to-door dan pendaftaran mandiri oleh krama, sistem ini mampu menyediakan basis data kependudukan yang terpusat, akurat, dan terstruktur, meliputi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Implementasi ini mendukung proses pengambilan keputusan, distribusi bantuan, serta koordinasi keamanan adat secara lebih efektif. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, prajuru adat, krama tamiu, dan petugas

pendataan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman langsung dalam mengoperasikan aplikasi SIPANDU BERADAT. Kegiatan ini mendorong peningkatan literasi digital di lingkungan desa adat, sehingga prajuru adat dan yowana mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan dengan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arjaya, I. M., Astara, I. W. W., and Kurniawandari, N. P. D. (2023). Implementasi Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara. *Postgraduated Community Service Journal*, 3(2), 64–71. <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.2.2022.64-71>
- Armiady, D. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi. *JURNAL TIKA*, 5(3), 93–98. <https://doi.org/10.51179/tika.v5i3.114>
- Darmaastawan, K., Oka Saputra, K., and Wirastuti, N. (2021). Optimasi Peran Desa Adat di Bali melalui Teknologi Informasi. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20, 161. <https://doi.org/10.24843/MITE.2021.v20i01.P19>
- Desa Adat Sangket. Profil Desa Adat Sangket. , Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali § (2021).
- Ni Ketut Sudianing, and Ketut Agus Seputra. (2019). PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *LOCUS Majalah Ilmiah FIA*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v11i2.284>
- Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. , Pemerintah Provinsi Bali (2019).